ANALISIS PERPAJAKAN OPTIMAL DALAM PERSEPTIF HUKUM PAJAK BERFALSAFAH PANCASILA

Ayang Fristia Maulana¹, Mochamad Basit Alhaetami², Anggraeni Marshanda Putri³, Artika Syifa Andesty⁴, Rama Adria Pamungkas⁵
fristia.maulna@gmail.com¹, basithaetami173@gmail.com², marshandaputri035@gmail.com³,
artikasyifa684@gmail.com⁴, ramaadriap@gmail.com⁵
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pancasila merupakan suatu dasar negara yang ada di Indonesia yang terdiri dari nilai yang dimiliki oleh pancasila hanya sila keempat saja, akan tetapi dapat dikaitkan dengan sila kelima. Adanya pemungutan dan pengelolaan pajak yang dilakukan secara adil seadil adilnya dan transparan merupakan suatu implementasi dari suatu prinsip-prinsip pada suatu keadilan sosial dan kerakyatan yang terkait dengan nilai-nilai pada Pancasila. Pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai suatu program serta layanan public yang dapat mendorong guna kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Konsep serta pengelolaan pajak ini dapat dipengaruhi oleh adanya intepretasi dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait, yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai pada Pancasila. Oleh karena itu, penting guna memastikan bahwa sistem perpajakan di suatu negara harus selaras dengan nilai-nilai moral serta etika yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, khususnya di negara Indonesia.

Kata Kunci: Perpajakan, wajib pajak dan nilai-nilai pada Pancasila.

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the state in Indonesia which consists of Pancasila values, while taxes are a mandatory contribution that must be made by every citizen to the government to finance government activities and state development. Not only the fourth principle, but it can be linked to the fifth principle which states social justice for all Indonesian people. The existence of tax collection and management that is carried out fairly and transparently is an implementation of the principles of social and popular justice which are related to the values of Pancasila. The concept and management of this tax can be influenced by the interpretation and implementation carried out by the government and related institutions, which are not always in line with the values of Pancasila. Therefore, it is important to ensure that the taxation system in a country is in line with the moral and ethical values held firmly by its people, especially in Indonesia.

Keywords: Taxation, taxpayers, , values in Pancasila.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu iuran yang harus dibayar, ini sudah ditetapkan di suatu perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. (Rochmat Soemitro., 1990). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan juga masih banyak lagi. Pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk pajak terhadap suatu penghasilan yang dimiliki oleh setiap individu dan pertambahan pada suatu produk atau layanan.

Bukan hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai suatu kebijakan guna mengatur akan distribusi kekayaan dan dapat mengurangi adanya kesenjangan ekonomi. Pancasila merupakan suatu dasar filsafat yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila dapat dikaitkan dengan hukum pajak dalam konteks penerapan keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan :

1. Adanya keadilan terhadap sosial, ialah salah satu nilai pancasila tentang kadilan yang dimiliki oleh setiap. Dalam konteks pajak, hal ini dapat mencerminkan pentingnya suatu pemerataan pada beban pajak dan alokasi pada hasil pajak guna kepentingan bersama, termasuk suatu penyediaan layanan public dan juga suatu program guna kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.
2. Adanya persatuan, ialah lebih menekankan kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks pajak, hukum pajak harus mencerminkan prinsip persatuan dengan menegakkan aturan yang sama bagi semua wajib pajak, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau budaya.
3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah lebih menekankan kepada suatu penghargaan terhadap martabat manusia dan suatu keadilan dalam interaksi sosial. Dalam hukum pajak, perlunya kebijakan yang adil dan beradab, yang di mana beban pajak ini dapat diterapkan secara proporsional yang sesuai dengan kemampuan dan pendapatan, serta memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Kerakyatan yang dipimpin, ialah suatu dprinsip ini lebih menekankan kepada akan pentingnya untuk bermusyawarah dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekarto dan Sri Mamudia, 2001). Dan juga, deskriptif yang berarti penelitian ini berisi tentang suatu penjelasan yang dilakukan secara detail, yang berupa suatu gambaran fenomena yang terkait dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik hukum pajak berfalsafah pada nilai pancasila

1. Ciri-ciri pajak

Kehadiran pajak ini dapat menjadikan sebuah ciri-ciri, seperti :

- Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Tidak ada kompensasi langsung yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak;
- Dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah
- Dapat digunakan untuk kemaslahatan pada rakyat, baik sebagai budgetair maupun regulerend

Pajak memiliki beberapa ciri-ciri khas yang dapat membedakannya dari bentuk pungutan atau pembayaran lainnya :

- Pajak yang bersifat wajib, yang memiliki arti bahwa setiap individu wajib untuk membayar pajak.
- Tidak menghasilkan suatu imbalan yang dilakukan dengan langsung, ialah pajak tidak dapat menghasilkan suatu imbalan yang dilakukan secara langsung yang setara dengan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
- Pajak bersifat teratur, yakni suatu pajak biaanya dikenakan secara teratur, baik itu dibayar pada tahunan, triwulanan, atau bulanan, tergantung pada jenis pajak dan peraturan yang berlaku.
- Tujuan pendapatan, ialah tujuan utama diadakannya pajak ini ialah guna menghasilkan suatu pendapatan dari pemerintahan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendamaikan suatu program atau layanan public yang sudah ditentukan.

- Obligasi hukum, ialah adanya pembayaran oleh pajak yang didasarkan pada kewajiban hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pajak
- Pembayaran pajak tidak timbul dari perjanjian antara pemerintah dan wajib pajak, melainkan merupakan kewajiban yang diberlakukan oleh hukum.
- Pembayaran pajak tidak berdasarkan pada manfaat pribadi yang diterima oleh wajib pajak dari penggunaan pajak tersebut.

2. Pajak yang optimal dan hukum pajak

Pajak optimal merupakan suatu sistem dari perpajakan yang dapat dirancang dan diimplementasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Beberapa ciri dari sistem perpajakan yang optimal, ialah :

- Sistem perpajakan yang optimal harus meminimalkan biaya administrasi dan pungutan, serta menghindari adanya distorsi ekonomi yang tidak perlu. Tarif pajak yang tepat dan mekanisme pemungutan pajak yang efisien akan membantu mencegah hilangnya sumber daya ekonomi.
- Pajak harus dikenakan secara adil, dengan mempertimbangkan kemampuan pembayar pajak.
- Sistem perpajakan yang optimal sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.
- Kebijakan perpajakan harus stabil dan harus dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian kepada wajib pajak dan pelaku ekonomi dalam perencanaan keuangan jangka panjang.
- Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan insentif yang mendorong perilaku yang diinginkan, seperti investasi, inovasi, atau konsumsi yang ramah lingkungan.
- Sistem perpajakan yang optimal harus dapat diatur dan dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah dan lembaga terkait. Ini mencakup infrastruktur administrasi yang memadai, sistem informasi yang baik, serta penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran perpajakan.

Tujuan dari sistem perpajakan yang optimal ialah untuk menciptakan suatu keseimbangan antara berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, dengan tujuan utama ialah :

- Adanya pendanaan pada pemerintah, yang dimana suatu pajak ini memiliki sumber utama pada pendapatan bagi suatu pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan banyak lagi.
- Redistribusi kekayaan, ialah pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan pada ekonomi dengan mengambil dari mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan.
- Pengaturan ekonomi, ialah pajak yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Misalnya, pajak tinggi pada barang-barang yang tidak diinginkan, seperti alkohol dan rokok, dapat mengurangi konsumsi mereka.
- Stabilitas fiskal, yang dimana pajak yang efisien ini dapat membantu guna menciptakan stabilitas fiskal dengan menghasilkan pendapatan yang konsisten bagi pemerintah.
- Efisiensi ekonomi, ialah suatu pajak yang dapat dirancang dengan baik guna meminimalkan distorsi ekonomi, memungkinkan pasar beroperasi dengan lebih

efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- Adanya kepatuhan dan kepastian hukum, ialah pajak yang optimal harus mendorong kepatuhan wajib pajak guna memberikan suatu kepastian dan keputusan yang diberikan.

Pajak memiliki dampak sosial seperti adanya pemerataan guna kesejahteraan yang dimana pajak dapat digunakan untuk mendukung adanya pemerataan kesejahteraan dengan mengumpulkan dana dari individu atau perusahaan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dan mengalokasikannya untuk layanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Penerimaan pajak ini sering digunakan untuk mendanai suatu program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat jaringan keselamatan sosial. Bukan hanya berdampak pada sosial saja, akan tetapi berdampak pada ekonomi juga, seperti adanya pengaruh terhadap konsumsi dan investasi. Pajak yang dapat mempengaruhi suatu tingkatan baik itu konsumsi maupun investasi dalam perekonomian. Misalnya, pajak konsumsi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, sementara pajak insentif dapat mendorong investasi di sektor-sektor tertentu.

Dan juga, sistem perpajakan yang efisien dan adil ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha dan mendorong inovasi. Ada beberapa jenis pajak, seperti pajak penghasilan dan pajak atas upah, dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan memengaruhi insentif untuk bekerja dan mempekerjakan tenaga kerja. Dampak yang terakhir ialah, dampak budaya. Pajak dengan memiliki dampak budaya dapat mencerminkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada didalam masyarakat.

Misalnya, adanya pemungutan pajak untuk mendukung program-program sosial dapat mencerminkan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Pajak juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen dalam hal preferensi pembelian, konsumsi, atau investasi. Penerimaan pajak yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kebudayaan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melestarikan warisan budaya dan pendidikan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pajak memiliki dampak yang luas dan kompleks dalam masyarakat, yang melibatkan interaksi antara berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak-dampak ini dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Di Indonesia, pajak dapat dikaitkan pada perundang-undangan yang membahas tentang perpajakan yang dilakukan secara optimal, yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, ialah :

- Peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara adil dan beradab, yang dimana sistem perpajakan haruslah memiliki suatu prinsip seperti keadilan pada sosial dan kemanusiaan yang adil seadil-adilnya.
- Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perpajakan yang saling menghormati persatuan pada Indonesia, dengan menegakkan aturan yang sama bagi semua wajib pajak tanpa adanya membedakan suatu agama, dll.
- Peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat yang transparan dan demokratis, merupakan suatu prinsip dari kerakyatan di dalam Pancasila lebih menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Peraturan perundang-undangan ini, memiliki tujuan guna mencerminkan suatu prinsip keadilan sosial dengan mengalokasikan hasil pajak untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

- Peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara efisien dan efektif ini dapat dialokasikan dengan tujuan untuk mengelola.

KESIMPULAN

Perpajakan optimal dalam perspektif hukum pajak yang berlandaskan falsafah pancasila ini dapat mengarahkan kepada penciptaan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pajak yang optimal harus memperhatikan suatu prinsip tentang keadilan sosial, di mana mereka yang memiliki suatu kemampuan tentang ekonomi lebih tinggi diwajibkan untuk membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar.

Ini sesuai dengan pancasila, yang bertujuan untuk menekankan perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Sistem perpajakan harus mencerminkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini berarti penerapan aturan yang sama bagi semua wajib pajak, tanpa membedakan suku, ras dan lain sebagainya, perpajakan ini harus dilakukan secara seadil-adilnya yang dimana sudah ditentukan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia.

Prinsip kerakyatan dalam pancasila ini lebih menekankan kepada pentingnya guna partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, suatu sistem perpajakan harus melibatkan sebuah partisipasi pada masyarakat dalam pembuatan kebijakan perpajakan, misalnya melalui proses konsultasi publik atau melalui perwakilan wakil rakyat di parlemen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pada nilai pancasila dalam hukum pajak, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pembangunan

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan pajak terkait dengan pancasila, ialah :

1. Keadilan pada sosial, suatu nilai dasar pada pancasila merupakan suatu keadilan sosial. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga beban pajak didistribusikan dapat dilakukan secara seadil-adilnya di antara semua lapisan masyarakat..
2. Kesejahteraan pada rakyat, yang dimana pancasila ini lebih menekankan kepada pentingnya guna mencapai suatu kesejahteraan. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi hasilnya yang merata.
3. Kemandirian ekonomi, ialah pancasila ini lebih menekankan kepada pentingnya guna mencapai kemandirian ekonomi bagi Indonesia. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan harus dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk memperkuat sektor-sektor ekonomi dalam negeri
4. Persatuan dan kesatuan, ialah pancasila ini lebih menekankan kepada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan harus memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk, serta menghindari konflik atau ketegangan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Analisis perpajakan optimal harus mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang mendukung integrasi ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pajak yang optimal ialah suatu pajak yang dapat dirancang dan diterapkan secara efisien, adil, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan penerimaan negara sambil meminimalkan distorsi ekonomi dan mempertimbangkan aspek sosial. Beberapa karakteristik pajak yang optimal, ialah :

1. Keadilan, ialah suatu pajak yang optimal harus didistribusikan secara adil di antara semua lapisan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan bayar dan manfaat yang diperoleh. Pajak yang proporsional, progresif, atau regresif bisa dipertimbangkan tergantung pada konteks sosial dan ekonomi negara.
2. Efisiensi di sektor ekonomi, ialah dengan pajak yang optimal ini harus menghasilkan sebuah distorsi ekonomi yang minimal.
3. Kepastian pada hukum, ialah suatu pajak yang dilakukan secara optimal harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ini memberikan kepastian kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka dan mencegah ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.
4. Adanya efektivitas dari suatu penerimaan pada pajak, ialah dengan pajak yang optimal ini harus menghasilkan suatu penerimaan yang cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini memerlukan sistem perpajakan yang efisien dalam pengumpulan dan penegakan pajak.
5. Sederhana dan transparan, ialah dengan pajak yang optimal ini sebaiknya memiliki struktur yang sederhana, dan transparan agar masyarakat mengerti akan pentingnya suatu hak yang dimiliki

Pajak yang optimal di Indonesia merupakan suatu subjek yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan. Pajak harus diterapkan secara seadil-adilnya, berarti suatu distribusi ini dikaitkan dengan sewajarnya terhadap ekonomi yang dimiliki setiap manusia. Yang dimana, setiap manusia membayarkan pajaknya sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan tidak adanya kecurangan yang didapatkan. Pajak juga seharusnya tidak dapat menghambat suatu pertumbuhan bagi ekonomi, pajak yang tidak efisien ini yang dapat menyebabkan distorsi pasar yang merugikan.

Sistem pajak yang diterapkan secara sederhana, dan mudah dipahami oleh semua masyarakat ini dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan suatu kepatuhan dari aturan yang sudah di tetapkan. Pajak harus di rancang dengan sebaik dan sebenar mungkin, sehingga dapat menghasilkan suatu pendapatan yang cukup baik untuk mendanai layanan public, dan tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh setiap manusia guna membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Rochmat Soemitro,. (1990). Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan,. Bandung: Eresco,.
 Soerjono Soekarto dan Sri Mamudia. (2001). Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat).
 Jakarta: Rajawali pers.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 1983

Undang-undang No. 16 Tahun 2009

Sumarsan, Thomas. (2017). Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS. Indeks.

Supinah. . (2022). Ketahanan Emosional Kemampuan Yang Harus Dimiliki. Praya: P41.